

ABSTRAK

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan dikelola dengan baik, terutama dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan di dunia, serta mencapai ke bahagiaan yang kekal di akhirat.

Zakat merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan ummat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia. Kelahiran UU Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air. Yang mana BAZNAS berperan sebagai regulator pengelolaan zakat secara nasional, diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan profesional. Disini UPZ memiliki peran yang sangat penting bagi BAZNAS,. Demikian juga UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

Menarik untuk dikupas bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomer 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pengelolaan pemungutan zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dan bagaimana solusi atas hambatan pengelolaan pemungutan zakat pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

Melalui penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan mengkaji kaidah hukum Islam dan Undang-undang serta bagaimana pelaksanaan pengelolaan pemungutan zakat tersebut dan solusi atas hambatan pengelolaan pemungutan zakat tersebut dengan mengambil Lokasi penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat khususnya pada UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga membutuhkan integrasi dan sinergitas dari seluruh lini baik pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan para pengelola zakat, sosialisasi dan palatihan pengelolaan zakat secara professional dan optimalisasi peran BAZNAS dalam pemberdayaan UPZ. BAZNAS diharapkan lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Zakat, UPZ, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

ABSTRACT

Zakat is an Islamic nomenclature that is very important for the development and improvement of the Islamic economy. The main sources of the teachings of Islam (al-Qur'an and Hadith) have explained how zakat should be organized and managed well, especially in the presence of amil as one of the groups that obtain and distribute zakat for their professional services in managing zakat. Islam gives references, beliefs, and way of life so that mankind can overcome the problems of the world, and attain to everlasting happiness in the hereafter.

Zakat is one aspect of Islamic teachings that potential to be an instrument of empowerment of the ummah and poverty alleviation, and become a symbol of harmonious relationships among human beings. The Birth of Act Number 23 Year 2011 on the Management of Zakat marks a new era of national zakat transformation that has spawned a new paradigm of zakat management in the country. Which BAZNAS acts as a regulator of zakat management nationally, is expected to perform its duties and functions in an accountable and professional. Here UPZ has a very important role for BAZNAS. Similarly UPZ Office Ministry of Religious Affairs Salatiga.

It is interesting to discuss how the implementation of Act Number 23 of 2011 on Zakat Management, what constraints arise in the management of the collection of zakat on UPZ Office of Religious Affairs Ministry of Salatiga City, and how the solution to the barrier of management of zakat collection at UPZ Office Ministry of Religious Affairs Salatiga .

Through normative juridical and sociological juridical research by examining the rules of Islamic law and the Law and how the implementation of the management of zakat collection and the solution to the barriers of management of the collection of zakat by taking the research location at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Salatiga City.

The results of research on the implementation of Law Number 23 Year 2011 on the Management of Zakat, especially at UPZ Office of the Ministry of Religious Affairs of Salatiga City requires the integration and synergy of all lines of government, scholars, community leaders, and managers of zakat, socialization and training of zakat management professionally optimizing the role of BAZNAS in UPZ empowerment. BAZNAS is expected to be more optimal in carrying out its duties and functions, and increase accountability and professionalism to increase public confidence.

Keywords: Zakat, UPZ, Law Number 23 Year 2011